

## PASANG SURUT DEMOKRASI INDONESIA (1945-1965)

Dedi Asmara<sup>1</sup>, Yuhardi<sup>2</sup>

STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh<sup>1,2</sup>  
dediasmararifa@gmail.com<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menjelaskan bagaimana perjalanan demokrasi Indonesia dari masa awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai pada masa akhir demokrasi terpimpin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Ilmu Sejarah. Hasil penelitian menunjukkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang berhasil diproklamirkan. Dengan berdirinya Indonesia yang baru perlu aturan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkat usaha yang gigih dari *founding father* bangsa Indonesia berhasil merumuskan undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945, Ketika Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, bangsa Indonesia menghadapi suasana politik yang baru. Berbagai macam kondisi politik terjadi, mulai dari pergantian kabinet, perseteruan ideology politik antara kelompok agama, nasionalis, dan sosialis, hingga dominasi satu kelompok tertentu yang berusaha melanggengkan kekuasaan. Simpulan penelitian memperlihatkan bahwa sejak berdirinya Indonesia sudah mulai mengalami berbagai persoalan dalam politik yang membuat Indonesia lebih dewasa dalam berpolitik

**Kata Kunci:** Demokrasi, Kekuasaan, Politik

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to explain how the journey of Indonesian democracy from the early days of the independence of the Republic of Indonesia to the end of guided democracy. This study uses historical research methods. The results of the research show that August 17, 1945 was the independence day of the Republic of Indonesia which was successfully proclaimed. With the founding of the new Indonesia, rules and order for the life of the nation and state are needed. Thanks to the persistent efforts of the founding fathers of the Indonesian nation, they managed to formulate a law known as the 1945 Constitution. When the Netherlands recognized Indonesian sovereignty in 1949, the Indonesian nation faced a new political atmosphere. Various kinds of political conditions occurred, ranging from cabinet changes, political ideological feuds between religious, nationalist and socialist groups, to the domination of one particular group that tried to perpetuate power. The conclusions of the research show that since its establishment Indonesia has started to experience various problems in politics which have made Indonesia more mature in politics*

**Keywords:** Democracy, Politics, Power.

## **PENDAHULUAN**

Menyerahnya tentara Hindia Belanda kepada Tentara Jepang yang disusul dengan kalahnya tentara Jepang, membulatkan tekad bangsa Indonesia untuk melepaskan diri baik dari kolonialisme Belanda maupun dari fasisme Jepang dan mendirikan suatu Negara modern yang demokratis. Keinginan yang mulia tersebut merupakan cita-cita anak bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Sesudah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 keadaan memang berubah total. Pada tanggal 18 Agustus Soekarno dan Moh. Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1945 panitia tersebut dalam sidang terakhirnya menetapkan Aturan Peralihan UUD 1945. Selain itu, panitia menetapkan berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR), BKR ini merupakan suatu badan yang merekrut para pemuda dari berbagai kalangan untuk dididik menjadi militer yang nantinya akan berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Anggota BKR dididik oleh orang Indonesia yang pernah mengalami didikan militer Jepang seperti *Gyugun*. Kemudian sebagian anggota BKR ini menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain itu dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) yang kemudian dikembangkan menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP menjadi pembantu presiden sebelum MPR dan DPR didirikan, seperti yang disebutkan dalam pasal IV Aturan Tambahan dan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: "Sebelum *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan*

*Pertimbangan Agung dibentuk menurut undang-undang dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Bersamaan dengan itu, dibentuk pula suatu partai politik sebagai alat perjuangan, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), dimana oleh Presiden Soekarno diharapkan akan menjadi "motor" perjuangan rakyat".*

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian Ilmu Sejarah. Tahap pertama adalah heuristik, dimana seluruh, arsip dan catatan penting lain dikumpulkan. Setelah itu dilakukan tahap kedua yaitu kritik terhadap dokumen, arsip dan catatan lainnya. Dalam melakukan tahap kritik ini tujuannya agar ditemukan fakta sejarah. Tahap ketiga adalah intepretasi, dimana pada tahap ini dilakukan analisis dan olahan data dan fakta. Tahap keempat adalah historiografi, dimana hasil analisis dan olahan data dan fakta tersebut dituliskan dalam bentuk tulisan yang objektif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang telah dibentuk dan langsung memainkan peran yang penting. Keanggotaan KNIP diambil dari tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan daerah agar seluruh Indonesia terwakili, ditambah dengan anggota PPKI yang tidak diangkat menjadi menteri. Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) juga dibentuk di berbagai daerah. Karena kesibukan membentuk KNID di berbagai daerah, pembentukan PNI untuk sementara ditunda.

Seiring dengan usaha untuk membentuk badan aparatur Negara timbul juga hasrat di beberapa kalangan untuk mendobrak suasana politik otortiter dan refresif yang telah berjalan selama tiga setengah tahun pendudukan Jepang ke arah kehidupan yang demokratis. Hal ini terjadi dalam beberapa tahap.

Tahap pertama, atas prakarsa beberapa politisi muda diusahakan agar kedudukan KNIP yang tadinya sebagai pembantu presiden menjadi suatu badan yang mempunyai wewenang legislatif. Sebelum MPR dan DPR didirikan pemerintah tidak bertanggungjawab kepada siapapun. Untuk itu, pada tanggal 16 Oktober 1945 dalam sidang paripurna KNIP yang dipimpin oleh Mr. Kasman Singodimedjo dan dihadiri oleh sebagian besar menteri kabinet serta Wakil Presiden Moh. Hatta ditetapkan bahwa selama MPR dan DPR belum dapat dibentuk, KNIP diberi wewenang legislatif dan wewenang untuk turut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (maklumat no. X tanggal 16 Oktober 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta). Selanjutnya, diputuskan bahwa tugas KNIP sehari-hari, berhubung dengan gentingnya situasi, dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada KNIP. Pada keesokan harinya Badan Pekerja KNIP dibentuk dalam sidang pleno KNIP yang dipimpin oleh Mr. Latuharhary. Melalui Maklumat No. X ini, KNIP berubah dari badan pembantu presiden menjadi semacam parlemen sementara.

Tahap kedua, Badan Pekerja mengusulkan agar para menteri bertanggungjawab kepada KNIP yang telah berubah menjadi parlemen sementara (ministerial responsibility). Usul ini disetujui oleh presiden pada tanggal 14 November 1945 dan selanjutnya disetujui oleh KNIP dalam sidang plenonya pada

tanggal 25-27 November 1945. Dengan demikian mulai tanggal 14 November 1945 sistem Pemerintahan Presidensial telah berubah menjadi sistem Pemerintahan Parlemerter. Ssstem ini selanjutnya dikukuhkan dalam UUD RIS 1949, UUDS 1950, sehingga tetap berlaku selama 14 tahun yaitu sampai Juli 1959 saat Indonesia kembali ke UUD 1945. Perubahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlemerter dianggap perlu untuk mendorong proses demokratisasi dan menangkis kecaman-kecaman dari pihak Belanda yang menganggap kemerdekaan Indonesia adalah hasil rekayasa Jepang. Hal ini menyebabkan pihak Belanda tidak bersedia berunding dengan pihak Indonesia. Kecaman terutama ditujukan kepada Soekarno.

Moh. Hatta menjelaskan usul Badan Pekerja agar para menteri bertanggungjawab pada KNIP. Dalam peralihan ke sistem parlemerter, jabatan kepala Negara (Presiden) dipisahkan dari jabatan Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri). Selain memperluas basis perjuangan karena mengikutsertakan semua kekuatan dalam perjuangan kemerdekaan, perubahan ini juga memberi peluang untuk tetap mempertahankan Presiden Soekarno sebagai Presiden dan pemimpin rakyat. Kabinet baru yang dilantik pada tanggal 14 November 1945 dipimpin oleh seorang Perdana Menteri Sjahrir yang tidak mempunyai latar belakang kolaborasi dengan Jepang. Diharapkan perubahan itu akan memudahkan perundingan dengan pihak sekutu yang telah menduduki sebagian besar wilayah Indonesia. Perundingan secara resmi dimulai pada tanggal 17 November 1945 dan Republik Indonesia diakui secara *de facto* memiliki kekuatan. Tindakan lain dari KNIP adalah

menyangkut partai politik, yaitu mengusulkan gagasan membentuk suatu partai tunggal atau partai negara. Gagasan ini oleh beberapa kalangan dicurigai, dianggap otoriter sebagai sisa pengaruh fasisme Jepang.

Tahap ketiga, dalam rangka demokratisasi Badan Pekerja mengusulkan agar dibuka kesempatan untuk mendirikan partai-partai politik dan usul tersebut disetujui oleh pemerintah. Dalam maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dikemukakan bahwa pemerintah menyukai munculnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada di masyarakat. Diharapkan bahwa partai-partai telah tersusun sebelum dilangsungkan Pemilihan Umum pada Bulan Januari 1946. Ditentukan juga pembatasan bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Dengan adanya partai-partai ini lebih mudah bagi pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban dari pimpinan organisasi perjuangan. Pengumuman tersebut serta-merta disambut masyarakat dengan gembira karena selama 3 tahun pendudukan Jepang setiap kegiatan politik dilarang sama sekali. Semangat nasionalisme dan patriotisme meluap-luap dan tidak dapat dibendung lagi. Semua golongan masyarakat ini berpartisipasi dan mendirikan berbagai macam organisasi dan partai. Dengan adanya berbagai macam partai politik maka berakhirlah usaha untuk mendirikan partai tunggal dan berkembanglah sistem multi partai dengan koalisi.

Pada awal revolusi fisik, partai-partai politik memainkan peran penting dalam proses membuat keputusan-keputusan yang menentukan nasib masyarakat bangsa Indonesia. Wakil-wakil partai duduk dalam kabinet. Akan tetapi ternyata stabilitas politik tidak tercapai. Tidak hanya partai dengan mayoritas seperti Masyumi dan PNI, menyebabkan pemerintah harus selalu berdasarkan koalisi partai besar dengan partai-partai kecil. Koalisi-koalisi ini ternyata tidak bertahan lama dan pemerintahan rata-rata bisa bertahan selama 1 tahun. Dengan demikian tidak ada satu kabinet pun yang berhasil melaksanakan program yang telah dicanangkan. Karena ulah partai koalisi berubah, sampai aksi militer Belanda II pada saat Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa menteri ditangkap oleh pasukan Belanda sudah terjadi 8 kali pergantian kabinet.

Masyumi yang merupakan satu-satunya organisasi yang pada masa rezim Jepang dibolehkan mengadakan kegiatan sosial telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berorganisasi secara efektif. Hal ini menyebabkan Masyumi muncul sebagai partai yang paling besar pada awal revolusi. Beberapa organisasi dari zaman kolonial yang bergabung misalnya Muhammadiyah dan NU. Selain Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI) dapat dianggap sebagai salah satu partai besar pula. Partai lama seperti Partindo, Gerindo, dan Parindra bergabung ke dalam PNI. Akan tetapi Parindra pada Bulan November 1949 keluar dari PNI. Setahun sebelumnya yaitu tahun 1948 beberapa tokoh yang visi dan misi politiknya lebih konservatif dari pemimpin PNI mendirikan Partai Indonesia Raya (PIR).

Disamping partai-partai besar tersebut, partai yang memiliki peran besar pada awal revolusi adalah golongan sosialis. Pada awalnya, Partai Sosialis yang diketuai oleh Sjahrir menyetujui penandatanganan persetujuan Linggarjati. Akan tetapi partai itu pecah menjadi 2 yaitu Partai Sosialis yang diketuai oleh Amir Sjarifuddin dan Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Sjahrir. Alasan perpecahan ini adalah karena Amir Sjarifuddin dengan sebagian besar anggota Partai Sosialis lebih bergerak ke sikap radikal, mendekati komunisme, sedangkan Sjahrir tetap pada ideologi Demokrat-Sosial yang moderat.

Partai besar lain yang memainkan peran penting dalam dunia politik Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai itu berhasil menguasai sayap kiri, suatu gabungan dari partai-partai yang berorientasi politiknya aliran kiri. Akan tetapi partai itu memperoleh pukulan berat sebagai akibat Pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Begitu pula suara kelompok-kelompok oposisi yang telah bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), seperti Partai Buruh. Dapat dikatakan bahwa Pemberontakan Madiun merupakan titik balik dalam konstelasi politik Indonesia. Mulai saat itu partai-partai seperti Masyumi dan PNI mendominasi panorama politik Indonesia. Peran mereka tercermin dalam KNIP dan Badan Pekerja.

Dalam masa revolusi fisik (1945-1949) partai politik memainkan peran yang penting dalam proses pembuatan keputusan. Wakil-wakil yang duduk dalam KNIP dan orang-orang yang duduk dalam kabinet kebanyakan adalah wakil partai. Dalam masa ini berbagai kabinet menghadapi bermacam-macam tantangan baik dari dalam maupun dari luar, misalnya dua agresi militer Belanda tahun

1947 dan 1948 dan Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Partai-partai tidak selalu sepakat mengenai strategi perjuangan untuk menghadapi pihak Belanda, termasuk perundingan dengan Belanda dan masalah-masalah lainnya. Setiap kali kabinet jatuh, komposisi partai dalam kabinet koalispun berubah.

Sikap partai-partai besar terhadap perundingan dengan pihak Belanda tidak selalu jelas. Masyumi, meskipun memiliki 6 menteri dalam Kabinet Sjahrir yang menandatangani perjanjian Linggarjati, memilih untuk *abstain* ketika KNIP melakukan voting tentang perjanjian tersebut di Malang pada tahun 1947. Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dengan 4 menteri dalam kabinet Sjahrir juga demikian. Namun tak satupun dari kedua partai ini menarik kembali menteri-menterinya karena diasumsikan bahwa keberadaan para menteri ini merupakan tanggungjawab pribadinya. Penarikan kembali menteri baru terjadi pada saat penandatanganan Perjanjian Renville oleh Amir Sjarifuddin menarik empat (4) menterinya dari kabinet sebelum penandatanganan. Sedangkan Partai Nasional Indonesia (PNI) menarik 5 menterinya setelah penandatanganan.

Sikap partai-partai mengenai Perjanjian Meja Bundar agak lebih jelas. Baik Masyumi maupun PNI mendukung perjanjian itu ketika dilakukan *voting* pada sidang pleno KNIP yang ke-6 tanggal 14 Desember 1949. PKI yang telah banyak kehilangan pengikut sebagai akibat dari Pemberontakan Madiun 1948 menentang perjanjian itu. Karena itu sikap PKI tidak berpengaruh. Begitu pula suara-suara kelompok oposisi yang telah bergabung dengan PKI seperti Partai Buruh. Dapat dikatakan bahwa Pemberontakan Madiun merupakan titik balik dalam konstelasi politik di Indonesia. Mulai saat itu, partai-

partai seperti Masyumi dan PNI mendominasi panorama politik Indonesia. Peran mereka ini tercermin dalam KNIP dan Badan Pekerja.

Sesudah kedaulatan *de jure* pada bulan Desember 1949 diakui oleh dunia luar dan sesudah berlakunya UUDS pada bulan Agustus 1950, pola kabinet berjalan terus. Semua koalisi melibatkan kedua partai besar yaitu Masyumi dan PNI, masing-masing dengan partai-partai pengikutnya. Koalisi partai-partai besar ini menyebabkan kabinet terus silih berganti. Akan tetapi stabilitas politik yang sangat didambakan tidak tercapai. Tidak adanya partai dengan mayoritas yang jelas (Masyumi dan PNI sama kuatnya) menyebabkan pemerintah harus selalu berdasarkan koalisi antara partai besar dengan partai-partai kecil. Koalisi-koalisi ini ternyata tidak langgeng dan pemerintah rata-rata hanya bertahan selama kira-kira satu tahun.

Dengan terbentuknya kabinet pertama yang dipimpin oleh Masyumi dengan Natsir sebagai pemimpinnya bangsa Indonesia mulai membangun suatu Negara modern. Salah satu usaha ialah menyusun suatu UU Pemilihan Umum sebagai cara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin Negara. Ikhtiar ke arah itu sudah dimulai tahun 1946. Namun baru pada tahun 1955 Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi berhasil melaksanakan Pemilu untuk Anggota DPR serta anggota Konstituante. Pada waktu itu persepsi masyarakat Indonesia ialah bahwa pemilihan umum merupakan wahana demokrasi yang sangat krusial. Diharapkan pemilihan umum akan mengakhiri pertikaian antara partai dan di dalam partai masing-masing yang pada akhirnya membawa stabilitas politik.

Pemilihan Umum tahun 1955 yang diselenggarakan dengan 100 tanda gambar menunjukkan bahwa jumlah partai bertambah dari 21 partai (ditambah wakil tak berfraksi) sebelum pemilihan umum menjadi 28 (termasuk perorangan). Hasil pemilu 1955 menghasilkan penyederhanaan partai dalam arti bahwa ternyata hanya ada 4 kursi yang besar yaitu PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi), dan PKI (39 kursi) yang bersama-sama menduduki 77% dari jumlah kursi dalam DPR. Partai-partai lainnya (termasuk yang kecil), yang dimasa pra pemilihan sering memegang peran penting dalam kehidupan politik (kadang-kadang melebihi dukungan masyarakat), ternyata masing-masing hanya memperoleh 1 sampai 8 kursi.

Kabinet pertama hasil pemilihan umum merupakan koalisi dari dua partai besar, PNI dan Masyumi beserta beberapa partai kecil lainnya. Dipimpin oleh PM Ali Sostroamidjojo II dari PNI. PKI tetap diluar kabinet, sesuatu hal yang sangat disesalkan oleh Presiden Soekarno. Kabinet ini merupakan kabinet yang mendapat dukungan paling besar yang pernah diperoleh suatu kabinet dalam DPR. Akan tetapi ternyata bahwa pemilihan umum tidak dapat membawa stabilitas yang sudah lama didambakan. Kabinet Ali II ini hanya bertahan selama 12 bulan (Maret 1956 sampai dengan April 1957) dan selama itu dihadapkan pada bermacam-macam masalah seperti konsepsi presiden dan pergolakan di daerah.

Kabinet Ali II digantikan oleh Kabinet Djuanda yang memimpin kabinet ini sebagai orang non-partai. Kabinetnya disebut "Kabinet Kerja". Kabinet ini berhasil bertahan selama 2 tahun 3 bulan (25 April-Juli 1959). Dengan begitu karakteristik periode ini berupa suatu seri

krisis cabinet yang tiada henti-hentinya. Pada umumnya yang disalahkan adalah partai politik. Salah satu sebabnya adalah kenyataan bahwa 2 partai yang bersaing tidak dapat memperoleh mayoritas di parlemen. Untuk keperluan itu, setiap partai baru membentuk koalisi dengan partai-partai kecil. Akan tetapi tidak ada loyalitas pada koalisi. Beberapa kali suatu partai yang menyatakan tidak setuju dengan kebijakan kabinet menarik kembali dukungannya sehingga kabinet jatuh karena kehilangan mayoritas dalam parlemen dan terjadi krisis kabinet. Untuk mengisi kekosongan dibentuk suatu kabinet baru dengan koalisi baru yang komposisinya berbeda pula. Dalam keadaan seperti ini sikap partai-partai tidak selalu konsisten. Adakalanya menteri dari partai oposisi itu menarik kembali menteri ada adakalanya tidak menarik kembali dengan dalil kedudukan menteri dalam kabinet bersifat pribadi. Dengan demikian umur setiap kabinet pendek dan stabilitas politik terganggu.

Selain itu ada sejumlah persoalan dalam partai masing-masing. Salah satu persoalan tersebut adalah loyalitas anggota terhadap partainya ternyata sangat tipis, sedangkan kekuatan-kekuatan sentrifugal sangat kuat. Tokoh partai tidak segan-segan keluar dari partai induknya begitu timbul konflik pribadi dan mendirikan partai baru. Hal ini biasanya terjadi pada saat menjelang pembentukan atau sesudah pembentukan suatu kabinet baru. Ketika satu atau dua orang tokoh partai tidak berhasil memperoleh kedudukan sebagai menteri dalam kabinet baru. Perilaku ini menimbulkan fragmentasi partai. Sebagai contoh dapat kita lihat perpecahan yang terjadi di beberapa partai politik. Di kalangan Masyumi, PSII memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1947. NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952.

Fragmentasi juga dialami oleh PNI pada tahun 1949 waktu Parindra keluar dari PNI. Pada tahun 1950 waktu beberapa tokoh keluar dan mendirikan Partai Rakyat Nasional (PRN). Di susul dengan pendirian Partai Indonesia Raya (PIR). PIR pada tahun 1954 pecah menjadi dua kelompok. Hal ini menyebabkan badan eksekutif lemah dalam menghadapi masalah baik nasional maupun internasional. Menanggapi hal ini, Presiden Soekarno memperlihatkan kekesalannya dengan menyerukan agar partai politik dikubur saja.

Sementara itu, sesudah dua setengah tahun bersidang, konstituante yang pada 10 November 1956 tetap tidak berhasil merumuskan suatu undang-undang dasar baru. Sekalipun telah tercapai kesepakatan mengenai banyak masalah antara lain wilayah, sistem pemerintahan, dan hak-hak azazi manusia, satu masalah tetap tidak dapat dirumuskan yaitu mengenai Undang-Undang Dasar. Dalam perdebatan mengenai Undang-Undang Dasar, konstelasi politik dalam konstituante terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu golongan nasionalis dengan anggota antara lain PNI, PKI, IPKI yang terdiri atas 274 anggota dan golongan agama dengan anggota Masyumi dan NU yang terdiri atas 230 anggota. Di luar kedua kelompok besar ini terdapat sebuah kelompok kecil sosial ekonomi yang terdiri dari 10 anggota yang juga meramaikan perdebatan tersebut.

Karena perbedaan antara kedua golongan besar itu tampaknya tidak dapat diatasi, Presiden Soekarno pada tanggal 22 April 1959 mengajukan usul dalam sidang konstituante untuk kembali ke UUD 1945. Ide ini dimana beberapa waktu sebelumnya telah dikemukakan oleh Jenderal Nasution dalam Sidang Dewan Nasional pada tahun 1958. Ucapan

Nasution itu mencerminkan kekecewaan dikalangan masyarakat karena sudah empat tahun berunding belum juga ada kesempatan mengenai UUD baru. Rasa tidak sabar terutama terdapat di kalangan tentara yang mengharapkan suatu eksekutif yang kuat untuk menghadapi hadangan dari partai dan mengkonsentrasikan pada pembangunan. Memang peran tentara di gelanggang politik telah berkembang dengan diumumkannya SOB pada tahun 1957 sesudah jatuhnya kabinet Ali Sostroamidjojo, kabinet terakhir di zaman Demokrasi Parleментар.

Sesudah pembicaraan panjang, kelompok nasionalis dan kelompok agama akhirnya dapat menerima usulan untuk kembali ke UUD 1945. Bagi kelompok agama, penerimaan ini dengan syarat yaitu diterima dengan suatu amandemen dimana perumusan Piagam Jakarta dicantumkan di dalam UUD 1945. Dalam sidang pleno amandemen yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1959, K.H. Masyakur sebagai pengusul, kalah. Setelah kekalahan tersebut, diadakan pemungutan suara mengenai usul Presiden Soekarno tanpa amandemen sampai 3 kali, yang hasilnya sama. Dalam sidang pemungutan suara terakhir yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 1959 yang dihadiri oleh 468 anggota yang menghasilkan 263 suara setuju dan 203 tidak setuju. Dalam hal ini suara setuju dibutuhkan 312 suara. Hal ini berarti bahwa golongan nasionalis memperoleh suara mayoritas meskipun belum mencapai suara mayoritas 2/3 dari anggota yang hadir seperti yang disyaratkan oleh pasal 137 UUDS.

Seandainya *voting* dilaksanakan pada suara terbanyak (50%+1), maka suara tersebut cukup untuk memenangkan usulan pemerintah. Akan tetapi, hanya karena masalah prosedur yaitu mayoritas

yang diperlukan adalah 2/3, usul pemerintah tidak dapat dijadikan Keputusan Kosntituante. Dengan kata lain, Konstituante gagal karena kedua golongan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Sesudah kekalahan pemerintah itu, konstituante diresekskan. Kedua pimpinan Konstituante Wilopo (Ketua) dari PNI dan Prawoto Mangkusasmito (wakil ketua) dari Masyumi dikabarkan akan bertemu untuk mencoba menyelamatkan konstituante. Sementara itu muncul kabar bahwa sebagian besar anggota Konstituante antara lain PKI, PNI, dan IPKI akan memboikot sidang konstituante. Setelah muncul desas-desus tersebut, muncul pula berita bahwa Suwirjo sebagai Ketua Umum PNI telah mengirim kabar ke Presiden Soekarno di Jepang bahwa partainya setuju UUD 1945 didekritkan dan konstituante dibubarkan saja.

Presiden Soekarno yang mendukung pemikiran kembali ke UUD 1945, pada tanggal 5 Juli mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945 sekembali ia pulang dari Jepang. Sebagai kompromi antara kedua golongan dibuatlah sebuah konsiderans. Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan bahwa usaha mendirikan dasar demokrasi di anggap gagal. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan. Pada awalnya memang ada keinginan yang tulus untuk mendirikan Negara demokrasi. Kelemahan usaha ini adalah bahwa kita belum pernah melihat atau mengalami *democracy in action*. Lagi pula tidak disadari bahwa demokrasi tidak hanya berarti kebebasan, tetapi juga menunjukkan etos dan perilaku yang bertanggungjawab.

Sekalipun sistem politik di Indonesia pada masa Demokrasi Parleментар dianggap gagal, akan tetapi perlu diakui bahwa periode ini juga banyak berjasa. Di bidang legislasi, partai-



partai melalui badan legislatif baik dalam parlemen sementara maupun parlemen hasil Pemilu 1955 berhasil mencapai rekor dalam pembuatan undang-undang sebanyak 48 undang-undang per tahun. Hasil ini sangat mengesankan dibandingkan DPR hasil Pemilu 1971 yang hanya menghasilkan 8 undang-undang per tahun.

### **Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)**

Zaman ini ditandai dengan diperkuatnya kedudukan presiden, antara lain: Pertama, dengan ditetapkannya sebagai presiden seumur hidup melalui TAP MPR No. III/1963. Kedua, pengurangan peranan partai politik kecuali PKI yang malah mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Ketiga, peningkatan peranan militer sebagai kekuatan sosial politik. Masa ini dinamakan periode segi tiga Soekarno, PKI, dan Militer karena merupakan perebutan kekuasaan antar 3 kekuatan tersebut. Dalam rangka melaksanakan konsep Demokrasi Terpimpin berdasarkan UUD 1945 Presiden Soekarno membentuk alat-alat kenegaraan seperti MPR dan DPA. Selain itu juga dibentuk suatu Dewan Nasional yang terdiri atas 40 anggota yang separuhnya terdiri atas golongan fungsional, seperti golongan buruh, tani, pengusaha, wanita, pemuda, agama, wakil daerah dan wakil ABRI. Komposisi Dewan Nasional mencerminkan pemikiran bahwa di luar partai politik beberapa kelompok masyarakat perlu didengar suaranya dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Dalam rangka memperkuat badan eksekutif dimulailah beberapa ikhtiar untuk menyederhanakan sistem partai dengan mengurangi jumlah partai melalui Perpres No. 7/1959. Maklumat

Pemerintah 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai dicabut dan ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai untuk diakui oleh pemerintah. Partai yang kemudian dinyatakan memenuhi syarat adalah PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, Partai Islam Perti, sedangkan beberapa partai lain dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dengan dibubarkannya Masyumi dan PSI pada tahun 1960 yang tersisa tinggal 10 partai politik saja. Di samping itu, pemerintah mencari wadah untuk memobilisasi semua kekuatan politik dibawah pengawasan pemerintah. Wadah yang mendasarkan pada NASKOM dibentuk pada tahun 1960 dan disebut Front Nasional. Semua partai termasuk PKI terwakili didalamnya. Begitu pula kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses membuat keputusan seperti golongan fungsional dan ABRI. Melalui kehadirannya dalam Front Nasional yang berdasarkan NASAKOM, PKI berhasil mengembangkan sayapnya dan mempengaruhi hamper semua aspek kehidupan politik. Secara umum dianggap bahwa Front Nasional ditujukan untuk melemahkan kedudukan partai politik. Pada tahun 1965 gerakan Gestapu-PKI mengakhiri riwayat Demokrasi Terpimpin yang telah bertahan selama 6 tahun.

### **SIMPULAN**

Dunia perpolitikan Indonesia akan selalu menarik untuk dikaji dan diteliti. Apalagi masa awal kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Ketika bangsa Indonesia baru “dilahirkan” tersebut, berbagai masalah muncul. Berkat tangan dingin dari pendiri bangsa ini, suatu tatanan dan aturan dasar berhasil ditetapkan. Di lain pihak, pasukan Sekutu

yang berusaha untuk tampil sebagai penengah membentuk pemerintahan di Indonesia dipandang tidak perlu. Walau akhirnya Sekutu pergi dari Indonesia dan “menyerahkan” Indonesia ke tangan Belanda.

Dalam keadaan yang serba tidak menentu tersebut, timbullah berbagai persoalan dalam kehidupan politik bangsa ini. Namun, itu dilalui dengan berbagai peristiwa suka dan duka. Keberhasilan mendirikan partai politik dan organisasi telah menunjukkan bangsa Indonesia mampu memainkan peran dalam menghadapi taktik politik Belanda. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan tidak hanya lewat angkat senjata namun juga melalui diplomasi dan perundingan. Ketika kedaulatan bangsa ini sudah diakui, perjalanan politik bangsa ini semakin menunjukkan kedewasaan. Pemilu tahun 1955 nan penuh histris tersebut, telah berhasil memilih anggota DPR dan Konstituante. Suatu pencapaian yang luar biasa. Namun, perpecahan dan menghilangkan dominasi suatu partai politik tidak dapat dielakkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. (1974). *Tonggak-tonggak di Perjalananku*. PT. Kinta. Jakarta
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Isjwara, F. (1964). *Pengantar Ilmu Politik*. Dhiwantara. Bandung
- Kartodirdjo, S. (2005). *Sejak Indische sampai Indonesia*. Kompas. Jakarta
- Kartodirdjo, S. (2014). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*. Cet. (Jilid I). Ombak. Yogyakarta
- Purnamawati, E. (2020). *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*. 18(2). 151-264.  
<https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/290/248>.
- Purnaweni, H. (2004). *Demokrasi Indonesia: dari Masa ke Masa*. *Jurnal Administrasi Publik*. 3(2). 119-131.  
<https://media.neliti.com/media/publications/73273-ID-demokrasi-indonesia-dari-masa-ke-masa.pdf>.
- Pusponegoro, M. D., Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid I-VI*. Balai Pustaka. Jakarta
- Reid, A. J. S., (1996). *Revolusi Nasional Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Ricklefs, M. C. (2022). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Serambi Ilmu Semesta. Jakarta
- Rosidi, A. (1969). *Ikhtisar Sedjarah Indonesia*. Binatjipta. Bandung
- Simbolon, P. T. (2006). *Menjadi Indonesia*, Kompas. Jakarta
- Soekarno, “Pidato Soekarno”. *Merdeka*, 25 Okotober 1945
- Soekarno, “Pidato Soekarno”. *Merdeka*, 28 Oktober 1956.
- Vlekke, B. (2008). *Nusantara Sejarah Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta